PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **EKA SAPRUDIN**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**
3. NHK : **167533**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — **Rp. 780.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 239 m2/88 m2 di KAB / KOTA TANAH BUMBU, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 299 m2/80 m2 di KAB / KOTA TANAH BUMBU, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m2/200 m2 di KAB / KOTA TANAH BUMBU, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — **Rp. 673.500.000**

1. MOTOR, KAWASAKI SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
2. MOBIL, WULING MINI BUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOTOR, PCX SEPEDA MOTOR Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000
4. MOTOR, YAMAHA N MAX B8HA/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 21.500.000
5. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2,7 SRZ 4X2 AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA — **Rp. 406.000.000**

D. SURAT BERHARGA — **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS — **Rp. 1.545.291.207**

F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**3.404.791.207**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**----**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**3.404.791.207**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.